



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 81 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SERTA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH SEBAGAI UNIT KERJA YANG
MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan, Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SERTA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH SEBAGAI UNIT KERJA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang kesehatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah SKPD atau unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
12. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

13. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disebut BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerapkan PPK-BLUD.
14. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
17. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis BLUD, adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
18. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
19. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.

BAB II RENCANA BISNIS ANGGARAN

Bagian Kesatu Penyusunan

Pasal 2

- (1) BLUD menyusun Rencana Strategis Bisnis BLUD dengan mengacu kepada rencana strategis SKPD.
- (2) Rencana Strategis Bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan:
 - a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya; dan
 - b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

- (4) Perhitungan akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan standar biaya yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD yang memuat paling sedikit menyajikan perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- (5) Dalam hal perhitungan akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BLUD menyusun perhitungan pengeluaran dengan proporsi jasa layanan dan biaya pegawai paling banyak 60% (enam puluh persen) dengan tetap menganut prinsip fleksibilitas untuk masing-masing BLUD.
- (6) Dalam hal BLUD belum menyusun standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BLUD menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Dalam hal BLUD ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi, tugas pembantuan, dana alokasi khusus, atau anggaran lainnya, proses pengelolaan keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pengeluaran BLUD merupakan biaya operasional, biaya non operasional, dan pengeluaran investasi.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (3) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (4) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.
- (5) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. biaya bunga;
 - b. biaya administrasi bank;
 - c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
 - d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
 - e. biaya non operasional lain-lain.
- (6) Pengeluaran Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi investasi dana dan pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.

Pasal 4

Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, terdiri dari:

- a. pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat (pasien Umum, peserta jaminan kesehatan nasional dan jasa layanan lainnya);
- b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
- c. hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
- d. APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN; dan
- e. pendapatan lain yang sah.

Pasal 5

- (1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 6

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus) dari pendapatan jasa layanan yang tercantum dalam RBA tahun anggaran yang dianggarkan.
- (2) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila volume kegiatan pelayanan dan pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang dianggarkan.
- (3) Penghitungan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain kecenderungan naik/turun selisih antara anggaran pendapatan jasa layanan dan realisasi dua tahun anggaran sebelumnya, serta selisih antara anggaran pendapatan jasa layanan dan prognosa tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
 - a. gambaran umum yang memuat gambaran singkat unit kerja, visi, misi, maksud dan tujuan, budaya BLUD dan susunan Pejabat Pengelola BLUD;
 - b. kinerja tahun berjalan meliputi:

1. hasil kegiatan usaha;
 2. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 3. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi; dan
 4. laporan keuangan tahun berjalan.
- c. RBA tahun selanjutnya yang meliputi:
1. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 2. asumsi makro dan mikro;
 3. target kinerja;
 4. analisis dan perkiraan biaya satuan serta perkiraan harga;
 5. anggaran pendapatan dan biaya; dan
 6. ambang batas.
- d. prognosa laporan keuangan/maju (*forward estimate*); dan
- e. Kesimpulan yang meliputi:
1. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan; dan
 2. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD.
- (2) Ketentuan mengenai format RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pengajuan

Pasal 8

- (1) Pimpinan BLUD mengajukan usulan RBA kepada kepala Dinas Kesehatan untuk disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD.
- (2) Usulan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan standar pelayanan minimum dan biaya dari keluaran (*output*) yang akan dihasilkan.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai rencana kerja anggaran unit kerja.
- (4) RBA yang telah disetujui oleh kepala Dinas Kesehatan diajukan sebagai bagian dari RKA-SKPD kepada Bupati melalui PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Pagu Anggaran BLUD dalam RKA-SKPD atau Pagu Anggaran BLUD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD dan surplus anggaran BLUD, dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu *output*, dan jenis belanja.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 9

- (1) PPKD mengkaji kembali RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

- (2) Pengkajian kembali RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama mencakup standar biaya dan anggaran BLUD, kinerja keuangan BLUD, serta besaran persentase ambang batas.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pembahasan bersama antara tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Dinas Kesehatan.
- (4) Hasil kajian atas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar dalam rangka pemrosesan rencana kerja anggaran unit kerja sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.
- (5) Setelah APBD ditetapkan, pimpinan BLUD melakukan penyesuaian atas RBA menjadi RBA definitif.
- (6) Dalam hal RBA definitif belum ditetapkan, PPK BLUD dapat membelanjakan sesuai dengan fleksibilitas pengeluaran berdasar ambang batas yang ditetapkan dalam RBA.

BAB III INTEGRASI/KONSOLIDASI RBA DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD/RKA-SKPD

Pasal 10

Untuk keperluan integrasi/konsolidasi, seluruh sumber dana lokasi biaya dikonversikan sesuai kelompok dan jenis belanja dalam APBD Kabupaten, dengan menggunakan basis kas.

Pasal 11

Ketentuan mengenai format tata cara integrasi/konsolidasi RBA dengan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV DPA-BLUD Bagian Kesatu Penyusunan

Pasal 12

- (1) RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) digunakan sebagai acuan dalam menyusun DPA-BLUD untuk diajukan kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) DPA-BLUD memuat seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan, rencana penarikan dana yang bersumber dari APBD, serta besaran persentase ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam RBA definitif.
- (3) DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BLUD-Unit Kerja kepada TAPD melalui Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Anggaran

Paragraf 1
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan anggaran pendapatan bersumber dari jasa layanan, hibah, kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah dilaksanakan melalui dokumen pelaksanaan anggaran pendapatan yang dikonsolidasikan dengan DPA Dinas Kesehatan.
- (2) Pimpinan BLUD menetapkan Bendahara Penerimaan guna melaksanakan fungsi Perbendaharaan untuk pendapatan BLUD.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

Paragraf 2
Pelaksanaan Anggaran Biaya/Penarikan Dana

Pasal 14

- (1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Pimpinan BLUD menetapkan bendahara pengeluaran guna melaksanakan fungsi perbendaharaan untuk biaya BLUD.
- (3) Seluruh biaya/pengeluaran, pelaksanaannya dilakukan melalui rekening kas BLUD.
- (4) Pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan alokasi biaya/pengeluaran menurut program dan kegiatan yang telah ditentukan.
- (5) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan ketersediaan kas yang ada pada rekening kas BLUD.
- (7) Dalam hal penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melebihi pagu anggaran DPA-BLUD dan tidak melebihi ambang batas, pemimpin BLUD wajib melaporkan kepada kepala Dinas Kesehatan, jika penarikan dana melebihi ambang batas maka wajib mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 15

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan keuangan yang meliputi tata cara penarikan dan pertanggungjawaban penggunaan dana DPA-BLUD diatur dengan kebijakan pemimpin BLUD.

- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada SKPKD.

BAB V PERUBAHAN

Pasal 16

- (1) Perubahan terhadap RBA definitif dan DPA-BLUD dilakukan apabila:
 - a. terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran yang berasal dari APBD;
 - b. belanja BLUD melampaui ambang batas fleksibilitas; dan
 - c. pergeseran dalam jenis belanja berkenaan.
- (2) Pergeseran dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan tertentu.
- (3) Dalam hal perubahan RBA definitif berakibat pada perubahan DPA-BLUD, maka perubahan RBA definitif diikuti dengan perubahan DPA-BLUD dengan mekanisme waktu yang mengikuti dengan jadwal penyusunan perubahan APBD.
- (4) Dalam hal perubahan RBA definitif belum ditetapkan, PPK-BLUD dapat membelanjakan sesuai dengan fleksibilitas pengeluaran berdasar ambang batas yang ditetapkan dalam RBA definitif.

Pasal 17

- (1) Pengesahan perubahan RBA definitif adalah sebagai berikut:
 - a. disahkan oleh pemimpin BLUD dan disampaikan kepada kepala Dinas Kesehatan dan SKPKD untuk belanja sampai dengan pagu DPA-BLUD dan tidak mengubah komposisi belanja DPA-BLUD; dan
 - b. disahkan oleh pemimpin BLUD dan diketahui dewan pengawas, untuk belanja yang melebihi pagu DPA-BLUD baik dalam ambang batas fleksibilitas maupun melebihi ambang batas fleksibilitas.
- (2) Dalam hal BLUD tidak mempunyai dewan pengawas maka perubahan RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disahkan oleh pemimpin BLUD dan diketahui oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dewan pengawas BLUD.
- (3) Pemimpin BLUD menyampaikan perubahan RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Kesehatan dan PPKD.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 September 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 81

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 81 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA
BISNIS DAN ANGGARAN SERTA DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH SEBAGAI
UNIT KERJA YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH

A. Sistematika Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran

Sistematika Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran, sebagai berikut:

Halaman Sampul
Ringkasan
Eksekutif
Kata
Pengantar
Daftar Isi
Halaman Sampul

BAB I PENDAHULUAN

- A. GAMBARAN UMUM
- B. VISI DAN MISI
- C. MAKSUD DAN TUJUAN
- D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA DAN DEWAN
PENGAWAS

BAB II KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN
ANGGARAN BERJALAN

- A. KONDISI LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI
PENCAPAIAN KINERJA
 1. Faktor Internal
 2. Faktor Eksternal
- B. PERBANDINGAN ASUMSI PADA WAKTU MENYUSUN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN DENGAN FAKTA
YANG TERJADI
 1. Aspek Makro
 2. Aspek Mikro
- C. PENCAPAIAN
KINERJA
 1. Non Keuangan (Kegiatan Berdasarkan Unit Layanan)
 2. Keuangan
 - a. Realisasi Pendapatan Berdasarkan Unit Layanan
 - b. Realisasi Biaya Berdasarkan Unit Layanan
 - c. Realisasi Biaya
 - d. Realisasi Investasi
 - e. Realisasi Pendanaan

- D. PROGNOSE LAPORAN KEUANGAN
 - 1. Neraca
 - 2. Laporan Operasional
 - 3. laporan Arus Kas
 - 4. Catatan Atas laporan Keuangan

BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN YANG DIANGGARKAN

- A. KONDISI LINGKUNGAN YANG DIPREDIKSI AKAN MEMPENGARUHI PENCAPAIAN KINERJA
 - 1. Faktor Internal
 - 2. Faktor Eksternal
- B. ASUMSI YANG DIGUNAKAN
 - 1. Aspek Makro
 - 2. Aspek Mikro
- C. SASARAN, INDIKATOR, TARGET KINERJA, DAN KEGIATAN BERDASARKAN UNIT LAYANAN
- D. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN
 - 1. Program Kerja
 - 2. Kegiatan Pelayanan
- E. PERKIRAAN PENDAPATAN
- F. PERKIRAAN BIAYA
 - 1. Biaya Berdasarkan Unit Layanan
 - 2. Total Biaya Operasional dan Non Operasional
- G. PERKIRAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN INVESTASI UNTUK UNIT LAYANAN
- H. PERKIRAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PENDANAAN
 - 1. Penerimaan Pendanaan
 - 2. Pengeluaran Pendanaan
- I. ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 - 1. Anggaran Pendapatan (Basis Akrua)
 - 2. Anggaran Biaya (Basis Akrua)
 - 3. Anggaran Pendapatan BLUD (Basis Kas)
 - 4. Anggaran Belanja BLUD (Basis Kas)
 - 5. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Investasi
 - 6. Anggaran Penerimaan dan Penngeluaran endanaan
- J. AMBANG BATAS RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

BAB IV PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN TAHUN YANG DIANGGARKAN

- A. PROYEKSI NERACA
- B. PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL
- C. PROYEKSI LAPORAN ARUS KAS
- D. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN YANG MEMUAT RENCANA PRIORITAS

BAB V PENUTUP

- A. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KEGIATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
- B. KESIMPULAN

B. Penjelasan Sistematika Rencana Bisnis dan Anggaran

1. Halaman Sampul

Memuat:

- a. Nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- b. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja pada SKPD yang bersangkutan;
- c. Tahun yang dianggarkan.

2. Kata Pengantar

Memuat alasan pokok penyusunan RBA oleh pemimpin BLUD.

3. Ringkasan Eksekutif

Memuat pokok-pokok substansi RBA yang disusun.

4. Daftar Isi

Memuat urutan dan halaman dokumen RBA yang disusun.

5. BAB I PENDAHULUAN

Memuat:

- a. Gambaran Umum
Berisi keterangan ringkas mengenai eksistensi dan kegiatan utama/pokok BLUD.
- b. Visi dan Misi
Memuat visi dan misi BLUD.
- c. Maksud dan Tujuan
Memuat maksud dan tujuan BLUD.
- d. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas
Memuat susunan dan nama pejabat pengelola dan dewan pengawas.

6. BAB II KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN BERJALAN

Memuat:

- a. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja.

Digambarkan mengenai hasil kegiatan tahun berjalan secara keseluruhan yang berisi penjelasan mengenai pencapaian target-target kinerja dan uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, meliputi:

1) Faktor Internal

Menggambarkan kondisi internal BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya, antara lain berkaitan dengan kondisi:

- a) pelayanan;
- b) keuangan;
- c) organisasi dan sumber daya manusia; dan
- d) sarana dan prasarana.

2) Faktor Eksternal

Menggambarkan kondisi di luar BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya, antara lain berkaitan dengan:

- a) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BLUD;
- b) kebijakan pemerintah/pemerintah daerah terhadap BLUD, menyangkut keuangan, sumber daya manusia, kelembagaan dan lain-lain;
- c) perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat;
- d) perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi;
- e) keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis; dan
- f) keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional.

b. Perbandingan Asumsi pada Waktu Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran dengan Fakta yang Terjadi.

Meliputi:

1) Aspek Makro

Dapat terdiri dari:

- a) pertumbuhan ekonomi;
- b) tingkat inflasi;
- c) pertumbuhan pasar;
- d) tingkat suku bunga pinjaman; dan
- e) kurs.

2) Aspek Mikro

Dapat terdiri dari:

- a) kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi Public Service Obligation (PSO);
- b) perubahan tarif layanan;
- c) pengembangan/peningkatan pelayanan; dan
- d) asumsi yang berkaitan dengan analisis rasio keuangan.

c. Pencapaian Kinerja.

Memuat pencapaian kinerja Non Keuangan dan Keuangan, dapat menggunakan pendekatan *Balanced Scorecards*, *Management By Objectives* (MBO), *Result Oriented Management* (ROM), *Result Based Management*, atau *Outcome Best Performance Management*.

Jika menggunakan pendekatan *Balanced Scorecards*, indikator kinerja terdiri dari:

1) Non Keuangan

Terdiri dari pencapaian kinerja berdasarkan unit layanan, antara lain berkaitan dengan perspektif:

- a) pelanggan;
- b) proses bisnis internal; dan
- c) pertumbuhan dan pembelajaran.

2) Keuangan

Memuat pencapaian semua aspek kinerja keuangan, dengan membandingkan antara prognosa dan anggaran tahun anggaran berjalan, sekurang-kurangnya meliputi:

- a) realisasi pendapatan berdasarkan unit layanan;
- b) realisasi biaya berdasarkan unit layanan;
- c) realisasi biaya;
- d) realisasi investasi; dan
- e) realisasi pendanaan.

Serta dapat ditambahkan analisis keuangan lainnya, seperti:

- a) likuiditas meliputi rasio lancar, rasio cepat, rasio kas;
- b) solvabilitas meliputi rasio hutang terhadap ekuitas, rasio hutang terhadap aset;
- c) aktivitas meliputi perputaran aset;
- d) piutang dan perputaran persediaan;
- e) rentabilitas meliputi pendapatan operasional dibagi biaya operasional (POBO), rasio proporsi pendapatan;
- f) produktivitas (hasil produksi setiap unit pelayanan dibagi dengan sumber daya yang digunakan dalam rupiah); dan
- g) efisiensi (output dibandingkan input).

d. Prognosa Laporan Keuangan.

Memuat:

1) Neraca

Disusun agar dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan BLUD sampai dengan 30 Juni, dan prognosa sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berjalan.

2) Laporan Operasional

Disusun untuk mengetahui realisasi sampai dengan 30 Juni dan prognosa sampai dengan 31 Desember atas jumlah pendapatan yang diakui dan biaya yang dibebankan pada akhir tahun anggaran berjalan.

3) Laporan Arus Kas

Disusun untuk mengetahui arus kas dan setara kas sampai dengan 30 Juni dan prognosa sampai dengan 31 Desember dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan, kenaikan (penurunan) kas dan setara kas bersih, kas dan setara kas awal, dan jumlah saldo kas dan setara kas pada akhir tahun anggaran berjalan.

4) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) memuat penjelasan pos- pos laporan keuangan, dan informasi lainnya yang relevan dengan laporan keuangan.

7. BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN YANG DIANGGARKAN

Memuat:

a. Kondisi Lingkungan yang Diprediksi akan Mempengaruhi Pencapaian Kinerja.

1) Faktor Internal

Menggambarkan kondisi internal BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung diprediksi akan mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya sampai saat disusunnya RBA. Faktor internal, antara lain:

- a) pelayanan;
- b) keuangan;
- c) organisasi;
- d) sumber daya manusia; dan
- e) sarana dan prasarana.

2) Faktor Eksternal

Menggambarkan kondisidi luar BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung diprediksi akan mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya sampai saat disusunnya RBA. Faktor eksternal, antara lain:

- a) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BLUD;
- b) kebijakan pemerintah/pemerintah daerah terhadap BLUD, menyangkut keuangan, sumber daya manusia, dan lain-lain;
- c) perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat;
- d) perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi;
- e) keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis; dan
- f) keadaan perekonomian nasional maupun internasional.

b. Asumsi yang Digunakan.

Menggambarkan asumsi yang digunakan pada waktu menyusun RBA tahun yang dianggarkan, meliputi:

1) Aspek Makro

Dapat terdiri dari:

- a) pertumbuhan ekonomi;
- b) tingkat inflasi;
- c) pertumbuhan pasar;
- d) tingkat suku bunga pinjaman; dan
- e) kurs.

2) Aspek Mikro

Dapat terdiri dari:

- a) kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi *Public Service Obligation* (PSO);

- b) proyeksi rata-rata kenaikan tarif layanan; dan
 - c) peningkatan pelayanan.
- c. Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan Kegiatan.
Sasaran, indikator, target kinerja, dan kegiatan berdasarkan unit layanan BLUD dalam meningkatkan mutu/kinerja layanan pada tahun yang dianggarkan.
- d. Program Kerja dan Kegiatan.
- 1) Program Kerja
Program kerja diisi 1 (satu) Program yaitu “Program Peningkatan Kualitas Pelayanan” (disesuaikan dengan tugas dan fungsi BLUD).
 - 2) Kegiatan
hanya ada satu kegiatan, yaitu kegiatan pelayanan, yang memuat semua jenis layanan yang ada di BLUD dan produk layanan utama BLUD.
- e. Perkiraan Pendapatan.
Berisi prognosa pendapatan BLUD tahun anggaran berjalan dan proyeksi tahun anggaran yang dianggarkan dari setiap sumber pendapatan.
- f. Perkiraan Biaya.
Meliputi:
- 1) biaya pelayanan;
 - 2) biaya pendukung pelayanan; dan
 - 3) total biaya pelayanan dan pendukung pelayanan.
- g. Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Investasi.
- 1) Penerimaan investasi untuk semua jenis unit layanan; dan
 - 2) Pengeluaran investasi untuk semua jenis unit layanan.
- h. Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan.
- 1) Penerimaan pendanaan; dan
 - 2) Pengeluaran pendanaan.
- i. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah.
Anggaran BLUD merupakan penjabaran program dan kegiatan dalam bentuk satuan mata uang berupa pendapatan dan biaya, yang dananya bersumber dari seluruh pendapatan BLUD.
- 1) Anggaran Pendapatan
Disusun berdasarkan sumber pendapatan yang berasal dari:
 - a) jasa layanan;
 - b) hibah;
 - c) hasil kerjasama;
 - d) APBD;
 - e) APBN; dan
 - f) lain-lain pendapatan BLUD yang sah baik berbasis akrual maupun berbasis kas.
 - 2) Anggaran Biaya/Belanja, disusun menurut:
 - a) sumber dan alokasi dana, meliputi anggaran biaya/belanja BLUD yang diperinci berdasarkan

- sumber dana yang diperoleh dan alokasi dana baik berbasis akrual maupun berbasis kas; dan
- b) jenis anggaran, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
 - 3) Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Investasi Disusun menurut sumber dan alokasi dana.
 - 4) Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan Disusun menurut sumber dan alokasi dana.
- j. Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran
- 1) Anggaran BLUD yang tercantum dalam RBA dapat bertambah atau berkurang dari yang direncanakan sepanjang bertambah atau berkurangnya terkait dengan pendapatan secara proporsional (*flexible budget*).
 - 2) *Flexible budget* tersebut ditetapkan dengan besaran ambang batas, dihitung dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain kecenderungan (trend) naik/turun selisih antara anggaran pendapatan jasa layanan dan realisasi dua tahun anggaran sebelumnya, serta selisih antara anggaran pendapatan jasa layanan dan prognosa tahun anggaran berjalan.
 - 3) Ambang batas ditetapkan dengan besaran prosentase dari pendapatan jasa layanan yang tercantum dalam RBA tahun anggaran yang dianggarkan. Hal tersebut dapat dilakukan apabila volume kegiatan pelayanan dan pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang dianggarkan.

Contoh penentuan ambang batas RBA Tahun Anggaran (20XX + 1), dibuat pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk Tahun Anggaran (20XX + 1):

Tabel Anggaran Pendapatan dan Realisasi/Prognosa BLUD yang bersumber dari JasaLayanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah

TA (20XX-2), (20XX-1), dan(20XX)

(dalam juta)

No	Tahun	Anggaran ⁶	Realisasi/ Prognosa	Selisih	
				Rp	%
1	2	3	4	5 = (4 - 3)	6 = (5/3 X
1	(20XX- 2)	5.00	7.000	2.000	40,00
2	(20XX- 1)	9.00	11.000	3.000	33,33
3	(20XX)	11.00	15.000	4.000	36,36
Jumlah					109,69

Berdasarkan tabel, didapat besaran ambang batas RBA tahun anggaran (20XX + 1) = $(109,69 : 3) = 36,56\%$ dari rencana biaya yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD

yang sah, Tahun Anggaran (20XX + 1). Untuk itu, apabila rencana biaya bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, Tahun Anggaran (20XX + 1), misal diperkirakan Rp.13.000.000.000,- maka besaran ambang batas 36,56% X Rp.13.000.000.000,- = Rp.4.752.800.000,- Dengan demikian, apabila realisasi biaya BLUD masih dibawah (Rp.13.000.000.000,- + Rp.4.752.800.000,-) = Rp.17.752.800.000,- BLUD dapat melaksanakan belanja dengan melaporkan kepada PPKD. Sedangkan apabila pendapatan melebihi Rp.17.752.800.000,- BLUD dapat melaksanakan belanja dari kelebihan pendapatan tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari kepala daerah terlebih dahulu dan dituangkan dalam bentuk peraturan kepala daerah.

8. BAB IV PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN TAHUN YANG DIANGGARKAN

Proyeksi laporan keuangan BLUD disajikan secara komparatif dengan membandingkan antara prognosa tahun berjalan dengan proyeksi tahun yang dianggarkan, terdiri dari:

- a. proyeksi neraca;
- b. proyeksi laporan operasional;
- c. proyeksi laporan arus kas; dan
- d. catatan atas laporan keuangan.

Langkah-langkah dalam menyusun proyeksi laporan keuangan BLUD:

- a. Dapatkan prognosa laporan keuangan tahun anggaran berjalan sebagaimana tersaji pada BAB II, terdiri dari prognosa:
 - 1) neraca;
 - 2) laporan Operasional;
 - 3) laporan arus kas; dan
 - 4) catatan atas laporan keuangan.
- b. Dapatkan kebijakan atau target-target, antara lain:
 - 1) piutang akhir tahun yang dianggarkan;
 - 2) persediaan akhir tahun yang dianggarkan; dan
 - 3) hutang akhir tahun yang dianggarkan.
- c. Dapatkan dan analisis rencana kegiatan (usaha) pada tahun yang dianggarkan, berupa aktivitas-aktivitas (data dari BAB III):
 - 1) Aktivitas Operasional, terdiri dari:
 - a) aktivitas yang berpengaruh pada akun pendapatan (basis akrual);
 - b) aktivitas yang berpengaruh pada akun biaya (basis akrual);
 - c) Aktivitas yang berpengaruh pada kewajiban jangka pendek; dan
 - d) Aktivitas lainnya yang berpengaruh pada aset lancar.
 - 2) Aktivitas Investasi, terdiri dari:
 - a) Pembelian/belanja aset tidak lancar
 - b) Penerimaan hasil investasi; dan
 - c) Penjualan/penghentian investasi.
 - 3) Aktivitas Pendanaan

Aktivitas yang berpengaruh pada keputusan keuangan (sumber dana eksternal), seperti penerimaan dan pembayaran utang.

- d. Siapkan proyeksi jurnal transaksi tahun yang dianggarkan, untuk mencatat proyeksi aktivitas operasional, investasi dan pendanaan sebagaimana direncanakan pada angka 2) dan angka 3).
- e. Siapkan kertas kerja (worksheet) laporan keuangan yang diproyeksikan, baik kertas kerja laporan operasional maupun kertas kerja neraca.
- f. Siapkan proyeksi jurnal penyesuaian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan, antara lain:
 - 1) penyisihan piutang;
 - 2) pendapatan yang masih harus diterima;
 - 3) penurunan nilai persediaan;
 - 4) depresiasi dan amortisasi;
 - 5) penurunan nilai aset tetap;
 - 6) provisi/kewajiban estimasian;
 - 7) biaya yang masih harus dibayar; dan
 - 8) reklasifikasi akun (misalnya utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun).
- g. Menyajikan laporan keuangan yang diproyeksikan komparatif dengan laporan keuangan prognosa, dengan urutan penyelesaian:
 - 1) Proyeksi Neraca:
 - a) diperoleh dari kertas kerja kolom neraca;
 - b) sajikan sesuai format neraca.
 - 2) Proyeksi Laporan Operasional:
 - a) diperoleh dari kertas kerja kolom laporan operasional;
 - b) kolom kredit merupakan pos-pos pendapatan dan keuntungan;
 - c) kolom debit merupakan pos-pos biaya dan kerugian;
 - d) sajikan sesuai format laporan operasional.
 - 3) Laporan Arus Kas:
 - a) menggunakan metode tidak langsung; atau
 - b) menggunakan metode langsung.
 - 4) Catatan atas Proyeksi Laporan Keuangan
Menjelaskan pos-pos proyeksi laporan keuangan yang memuat informasi lebih lanjut tentang:
 - a) penjelasan Atas Informasi-Informasi Keuangan
Menjelaskan pos-pos laporan keuangan, termasuk rincian dan pengungkapan yang memadai (*disclosure*). Sebagai contoh untuk pos kas dan setara kas, dan piutang usaha.
 - b) penjelasan atas informasi lainnya

9. Bab V Penutup

Memuat:

- a. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah antara lain penghapusan piutang, penghapusan persediaan, penghapusan aset tetap, penghapusan aset lain-lain, pemberian pinjaman, kerjasama dengan pihak ketiga, remunerasi pejabat pengelola dan pegawai serta dewan pengawas.

b. Kesimpulan

Berisikan seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran yang dipandang perlu.

10. Lampiran

Memuat hal-hal yang perlu dilampirkan sebagai data pendukung dalam penyusunan RBA.

C. Integrasi/Konsolidasi Rencana Bisnis Dan Anggaran

Untuk keperluan integrasi/konsolidasi RBA yang telah disusun, seluruh sumber pendapatan, penerimaan, biaya, dan pengeluaran pada BLUD dikonversikan sesuai kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD, dengan menggunakan basis kas.

Langkah-langkah untuk integrasi/konsolidasi, sebagai berikut:

1. melakukan pemetaan/analisis data pendapatan, biaya dan pengeluaran.
2. pembuatan kertas kerja konversi dari basis akrual ke basis kas.

Contoh I merupakan Konversi Pendapatan BLUD Menjadi Pendapatan APBD studi kasus Tahun Anggaran (20XX + 1) (dalam jutaan rupiah) dengan contoh kasus sebagai berikut:

1. Rencana anggaran pendapatan BLUD Tahun Anggaran (20XX + 1) sebesar Rp.100,- (basis akrual).
2. Sesuai prognosa laporan keuangan 31 Desember (20XX) diperkirakan ada piutang sebesar Rp.30,-
3. Rencana piutang 31 Desember tahun (20XX + 1) sebesar Rp.25,-

Maka cara mengkonversikan pendapatan BLUD menjadi pendapatan APBD adalah sebagai berikut:

Pendapatan APBD TA (20XX + 1) yang dilaporkan (sebagai basis kas), adalah:

= {Prognosa piutang tanggal 31 Desember (20XX) + rencana pendapatan TA (20XX + 1)} - Rencana piutang tanggal 31 Desember TA (20XX + 1) = (Rp.30 + Rp.100) - Rp.25 = Rp.105,-

Apabila terdapat uang muka pada pendapatan BLUD yang diterima pada tanggal 31 Desember 20XX sebesar Rp.15,- dan pada tanggal 31 Desember (20XX + 1) direncanakan sebesar Rp.20,- maka pendapatan dalam APBD tahun anggaran (20XX + 1) menjadi (Rp.105 + Rp.20) - Rp.15 = Rp.110,-

Contoh II merupakan konversi biaya BLUD menjadi Belanja APBD (dari basis akrual ke basis kas), studi kasus Tahun Anggaran (20XX + 1) (dalam jutaan rupiah):

1. Rencana kebutuhan biaya untuk barang/jasa Tahun (20XX + 1) sebesar Rp.80,-

2. Rencana persediaan akhir tahun (20XX + 1) sebesar Rp.10,-
3. Sisa Persediaan akhir tahun (20XX) diperkirakan sebesar Rp.15,-
4. Perkiraan utang kepada pihak ketiga akhir tahun (20XX) sebesar Rp.20,-
5. Rencana utang akhir tahun (20XX + 1) sebesar Rp.5,-

Maka, rencana pembelian barang/jasa tahun anggaran (20XX + 1), adalah:

= (Rencana kebutuhan barang dan jasa TA (20XX + 1) + rencana persediaan 31 Desember (20XX + 1)) - prognosa sisa persediaan 31 Desember (20XX) = (Rp.80 + Rp.10) - Rp.15 = Rp.75,-

Selanjutnya dihitung konversi pembelian BLUD ke belanja APBD, adalah

= {rencana pembelian barang/jasa TA (20XX + 1) + perkiraan utang 31 Desember (20XX)} - rencana utang 31 Desember (20XX + 1) = (Rp.75 + Rp.20) - Rp.5 = Rp.90,-

Maka, rencana belanja barang/jasa tahun anggaran (20XX + 1) adalah = Rp.90,- (sebagai basis kas).

Format tata cara integrasi/konsolidasi RBA dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD atau RKA-SKPD, sebagai berikut:

1. Pendapatan BLUD ke Dalam Pendapatan APBD

No	Sumber Pendanaan BLUD	Jenis Pendapatan Asli Daerah dalam APBD				Jumlah
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	
1.	Jasa Layanan				XXX	XXX
2.	Hibah				XXX	XXX
3.	Kerjasama				XXX	XXX
4.	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah				XXX	XXX
TOTAL					XXX	XXX

2. Pengeluaran BLUD ke Dalam Belanja APBD

No	Biaya	Jenis Belanja Dalam APBD			Jumlah
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	
1	2	3	4	5	6
I.	BIAYA OPERASIONAL				
A.	Biaya Pelayanan				
1.	Biaya pegawai	XXX			XXX
2.	Biaya bahan		XXX		XXX
3.	Biaya jasa pelayanan		XXX		XXX
4.	Biaya Pemeliharaan		XXX		XXX

1	2	3	4	5	6
5.	Biaya barang dan jasa		XXX		XXX
6.	Biaya depresiasi		-		-
7.	Biaya pelayanan lainnya		XXX		XXX
B.	Biaya Umum dan Administrasi				
1.	Biaya pegawai	XXX			XXX
2.	Biaya administrasi kantor		XXX		XXX
3.	Biaya pemeliharaan		XXX		XXX
4.	Biaya barang dan jasa		XXX		XXX
5.	Biaya promosi		XXX		XXX
6.	Biaya Depresiasi		-		-
7.	Biaya umum dan administrasi lainnya		XXX		XXX
II.	BIAYA NON OPERASIONAL				
1.	Biaya bunga		XXX		XXX
2.	Biaya administrasi bank		XXX		XXX
3.	Kerugian penjualan aset		XXX		XXX
4.	Kerugian penurunan nilai		XXX		XXX
5.	Biaya non operasional lainnya		XXX		XXX
III.	PENGELUARAN INVESTASI				
1.	Pembelian tanah			XXX	
2.	Pembelian peralatan dan mesin			XXX	
3.	Pembangunan gedung dan bangunan			XXX	
4.	Pembelian kendaraan			XXX	
5.	Pembelian peralatan kantor			XXX	
6.	Pembangunan jalan, irigasi dan jaringan			XXX	
7.	Pembelian surat berharga jangka panjang			XXX	
8.	Pembangunan/pengembangan sistem informasi			XXX	
9.	Pembangunan/pengembangan sarana fisik lainnya			XXX	
TOTAL BIAYA		XXX	XXX	XXX	XXX

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 81 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA
BISNIS DAN ANGGARAN SERTA DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH SEBAGAI
UNIT KERJA YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH

FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

.....

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

.....

RENCANA BISNIS
DAN ANGGARAN
(R B A)

TAHUN 20XX

KATA PENGANTAR

(memuat alasan pokok penyusunan RBA oleh Pemimpin BLUD).

Sumedang,
20XX Pemimpin BLUD

.....

.....

RINGKASAN EKSEKUTIF

(memuat pokok-pokok substansi RBA yang disusun).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
KATA PENGANTAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
BAB I. PENDAHULUAN	
A. GAMBARAN UMUM	
B. VISI DAN MISI	
C. MAKSUD DAN TUJUAN	
D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA DAN DEWAN PENGAWAS	
BAB II. KINERJA BLUD TAHUN ANGGARAN 20XX	
A. KONDISI LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN KINERJA	
1. Faktor Internal	
2. Faktor Eksternal	
B. PERBANDINGAN ASUMSI PADA WAKTU MENYUSUN RBA DENGAN FAKTA YANG TERJADI.....	
1. Aspek Mikro	
2. Aspek Makro	
C. PENCAPAIAN KINERJA.....	
1. Non Keuangan.....	
2. Keuangan.....	
a. Realisasi Pendapatan	
1) Realisasi Pendapatan Berdasarkan Unit Layanan	
2) Realisasi Total Pendapatan	
b. Realisasi biaya	
1) Realisasi Biaya Berdasarkan Unit Layanan.....	
2) Realisasi Total Biaya	
c. Pencapaian Program Investasi dan Pendanaan.....	
1) Investasi.....	
2) Pendanaan.....	
D. LAPORAN KEUANGAN TAHUN 20XX.....	
1. Neraca	
2. Laporan Operasional	
3. Laporan Arus Kas.....	
4. Catatan atas Laporan Keuangan	
BAB III. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 20XX+1	
A. KONDISI LINGKUNGAN BLUD YANG MEMPENGARUHI.....	
1. Faktor Internal	

2.	Faktor Eksternal
B.	ASUMSI YANG DIGUNAKAN
1.	Aspek Makro
2.	Aspek Mikro
C.	SASARAN, INDIKATOR, TARGET KINERJA DAN KEGIATAN
D.	PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN
1.	Program
2.	Kegiatan
E.	PERKIRAAN PENDAPATAN
1.	Pendapatan BLUD
2.	Pendapatan Jasa Layanan Per Unit
F.	PERKIRAAN BIAYA
1.	Biaya Berdasarkan Unit Pelayanan
2.	Total Biaya Operasional dan Non Operasional
3.	Biaya berdasarkan Komponen dan Anggarannya
G.	PERKIRAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN INVESTASI
1.	Perkiraan Penerimaan Investasi
2.	Pengeluaran Investasi
H.	PERKIRAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PENDANAAN
1.	Perkiraan Penerimaan Pendanaan
2.	Pengeluaran Pendanaan
I.	ANGGARAN BLUD
1.	Anggaran Pendapatan BLUD berdasarkan Sumber Pendapatan (Basis Akrual)
2.	Anggaran Biaya (Basis Akrual)
3.	Anggaran Pendapatan (Basis Kas)
4.	Anggaran Belanja (Basis Kas)
5.	Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Investasi (Basis Kas)
6.	Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan
J.	AMBANG BATAS RBA
BAB IV.	PROYEKSI KEUANGAN TAHUN 20XX+1
A.	NERACA
B.	LAPORAN OPERASIONAL
C.	LAPORAN ARUS KAS
D.	CATATAN ATAS PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN

BAB V. PENUTUP.....

 A. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN DALAM
 IMPLEMENTASI KEGIATAN BLUD.....

 B. KESIMPULAN

LAMPIRAN.....

RINGKASAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK KONSOLIDASI DENGAN
APBD/RKA-SKPD.....

BAB II
KINERJA BLUD TAHUN ANGGARAN 20XX

A. KONDISI LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN KINERJA

(memuat gambaran mengenai hasil kegiatan tahun berjalan secara keseluruhan yang berisi penjelasan mengenai pencapaian target-target kinerja dan uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja).

.....
.....
.....

1. Faktor Internal

(Menggambarkan kondisi internal BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya, antara lain berkaitan dengan kondisi:

- *pelayanan;*
- *keuangan;*
- *organisasi dan sumber daya manusia; dan*
- *sarana dan prasarana.)*

.....
.....
.....

a. Pelayanan Medis

1) Kekuatan

- a)
- b)
- c)

2) Kelemahan

- a)
- b)
- c)

b. Keuangan

1) Kekuatan

- a)
- b)
- c)

2) Kelemahan

- a)
- b)
- c)

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1) Kekuatan

a)

b)

c)

2) Kelemahan

a)

b)

c)

d. Sarana dan Prasarana

1) Kekuatan

a)

b)

c)

2) Kelemahan

a)

b)

c)

2. Faktor Eksternal

(Menggambarkan kondisi di luar BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya, antara lain berkaitan dengan:

- *peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BLUD;*
- *kebijakan pemerintah/pemerintah daerah terhadap BLUD, menyangkut keuangan, sumber daya manusia, kelembagaan dan lain-lain;*
- *perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat;*
- *perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi;*
- *keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis;*
- *keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional.)*

a. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BLU

.....

b. Kebijakan subsidi pemerintah untuk RS

.....

c. Perkembangan sosial-budaya dan tingkat pendidikan masyarakat

.....

d. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

.....

e. Status sebagai RSD

.....

- f. Keadaan persaingan dalam industri pelayanan kesehatan
.....
- g. Globalisasi Ekonomi
.....
- h. Ancaman Bencana Nasional
.....
- i. Kebijakan pemerintah tentang SDM/PNS
.....
- j. Perkembangan teknologi kesehatan/kedokteran
.....

B. PERBANDINGAN ASUMSI PADA WAKTU MENYUSUN RBA DENGAN FAKTA YANG TERJADI

1. Aspek Makro

NO.	INDIKATOR EKONOMI	ASUMSI 20XX	FAKTA YANG TERJADI
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)		
2.	Tingkat Inflasi (%)		
3.	Pertumbuhan Pasar (%)		
4.	Tingkat Suku Bunga Pinjaman (%)		
5.	Kurs 1 US\$ (Rp)		

(Memuat uraian tentang kondisi BLUD dalam konteks indikator ekonomi daerah setempat).

2. Aspek Mikro

NO.	INDIKATOR	ASUMSI 20XX	FAKTA YANG TERJADI
1.	Pembiayaan publik sebagai fungsi <i>PSO</i>		
2.	Perubahan tarif layanan		
3.	Pengembangan produk baru		
4.	Peningkatan volume layanan		
5.	Asumsi-asumsi dalam analisis rasio keuangan		

(Dijelaskan implikasi masing-masing asumsi terhadap rencana kinerja, berupa persentase, pertumbuhan, kenaikan/penurunan)

C. PENCAPAIAN KINERJA

1. Non Keuangan

a. Kegiatan Pelayanan (berdasarkan unit)

No.	UNIT PELAYANAN	SATUAN	KINERJA PELAYANAN TAHUN 20XX			KET (%)
			Target	Realisasi (s/d bulan..)	Prognosa	
1	2	3	4	5	6	7
1	Upaya Kesehatan Masyarakat					
2	Upaya Kesehatan Perorangan, Kefarmasian, dan Laboratorium					

1	2	3	4	5	6	7
3	Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Perkesmas					
4	Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan					
5	Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
6	Administrasi dan Kesekretariatan					

Catatan : jika data per unit layanan belum dimiliki, data kinerja keuangan dapat dibuat seperti berikut ini

b. Pelayanan (berdasarkan kelompok)

NO.	KEL. PELAYANAN	SATUAN	KINERJA PELAYANAN TAHUN 20XX			KET (%)
			Target	Realisasi (s/d bulan...)	Prognosa	
1	Kunjungan Rawat Jalan					
2	Kunjungan UGD					
3	Pasien Rawat Inap					
4	B O R					
5	L O S					

Catatan:

1. Kinerja non keuangan dapat pula dilihat dari perspektif Balance Scorecard, yaitu dengan menyampaikan data pencapaian kinerja dilihat dari perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pertumbuhan/pembelajaran SDM.
2. Selain dengan perspektif balance scorecard, kinerja non keuangan dapat juga disampaikan dari sasaran dan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk masing-masing unit pelayanan.

Penjelasan Pencapaian Kinerja:

.....

2. Keuangan

memuat pencapaian semua aspek kinerja keuangan, dengan membandingkan antara realisasi dan anggaran, sekurang-kurangnya meliputi:

- pendapatan;
- biaya;
- investasi;
- pendanaan; dan
- analisis keuangan lainnya, seperti:
 - likuiditas meliputi rasio lancar, rasio cepat, rasio kas;
 - solvabilitas meliputi rasio hutang terhadap ekuitas, rasio hutang terhadap aset;
 - aktivitas meliputi perputaran aset, perputaran piutang, perputaran persediaan;
 - rentabilitas meliputi pendapatan operasional dibagi biaya operasional (POBO), rasio proporsi pendapatan;
 - produktivitas (hasil produksi setiap unit pelayanan dibagi dengan sumber daya yang digunakan dalam rupiah);
 - efisiensi (output dibandingkan input).

a. Realisasi Pendapatan

NO	UNIT PELAYANAN	PENDAPATAN TAHUN 20XX			Selisih (%)
		Anggaran	Realisasi (s/d bulan.....)	Prognosa	
1	UNIT PELAYANAN				
a.	Rawat Jalan dan UGD				
b.	Rawat Inap				
c.	One Day Care				
d.	Tindakan Kebidanan				
e.	Penunjang Medik				
2	UNIT PENDUKUNG PELAYANAN				
a.	Pelayanan data dan Informasi				
b.	Pemeriksaan hygiene dan sanitasi tempat-tempat umum, tidak termasuk pemeriksaan laboratorium pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta				
	TOTAL PENDAPATAN				

b. Realisasi Biaya

1) Realisasi Biaya Berdasarkan Unit Layanan

NO	UNIT PELAYANAN	BIAYA TAHUN 20XX			Selisih (%)
		Anggaran	Realisasi (s/d bulan.....)	Prognosa	
1	UNIT PELAYANAN				
a.	Rawat Jalan dan UGD				
b.	Rawat Inap				
c.	One Day Care				
d.	Tindakan Kebidanan				
e.	Penunjang Medik				
2	UNIT PENDUKUNG PELAYANAN				
a.	Pelayanan data dan Informasi				
b.	Pemeriksaan hygiene dan sanitasi tempat-tempat umum, tidak termasuk pemeriksaan laboratorium pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta				
	JUMLAH				

Catatan : Apabila sistem informasi keuangan belum memungkinkan mengemukakan data seperti pada tabel diatas (biaya berdasarkan jenis layanan), maka minimal dapat mengemukakan data biaya seperti pada tabel dibawah ini (sesuai RBA).

2) Realisasi Total Biaya

Komponen Biaya	Anggaran Tahun 20XX	Realisasi s/d	Prognosa Tahun 20XX+1	Capaian
1	2	3	4	5 =(4)/(2)
A. Biaya Pelayanan				
1. Biaya pegawai				
2. Biaya bahan ¹⁾				
3. Biaya jasa pelayanan				
4. Biaya pemeliharaan				
5. Biaya barang dan jasa				
6. Biaya depresiasi				
7. Biaya pelayanan lainnya				
B. Biaya Umum Dan Administrasi				
1. Biaya pegawai				
2. Biaya administrasi kantor				
3. Biaya pemeliharaan				
4. Biaya barang dan jasa				
5. Biaya promosi				
6. Biaya depresiasi				
7. Biaya umum dan administrasi lainnya.				
C. Biaya Non Operasional				
1. Biaya bunga				
2. Biaya administrasi bank				
3. Kerugian penjualan aset				
4. Kerugian penurunan nilai				
5. Biaya non operasional lainnya				
Jumlah Biaya (A+B+C)				

Penjelasan Pencapaian Kinerja:

.....

c. Pencapaian Program Investasi dan Pendanaan

1) Investasi

No	Jenis Invetasi	Anggaran Tahun 20XX	Realisasi s/d	Capaian (%)	Ket
1.	Pelepasan aset				
a.	Kendaraan				
b.	Mesin				
c.	Dst.....				
2.	Pencairan investasi				
a.	Pencairan deposito				
b.	Penjualan surat berharga				
c.	Dst.....				
Jumlah					

Penjelasan Pencapaian Kinerja :

.....

¹⁾ Termasuk harga pokok barang yang dijual.

Pengeluaran Investasi

No	Jenis Investasi	SUMBER DANA, ANGGARAN, DAN REALISASI														Capaian (%)	Ket	
		Jasa layanan		Hibah		Kerjasama		APBD		APBN		Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah		Jumlah				
		Anggaran Tahun 20XX	Realisasi Sd...	Anggaran Tahun 20XX	Realisasi Sd...	Anggaran Tahun 20XX	Realisasi Sd ...	Anggaran Tahun 20XX	Realisasi Sd ...	Anggaran Tahun 20XX	Realisasi Sd..	Anggaran Tahun 20XX	Realisasi Sd ...					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Tanah																	
2.	Peralatan dan mesin																	
3.	Gedung dan bangunan																	
4.	Kendaraan																	
5.	Perlengkapan dan peralatan kantor																	
6.	Jalan, irigasi, dan jaringan																	
7.	Aset sewa guna usaha																	
8.	Surat utang ²⁾ dan surat modal ³⁾ .																	
9.	Deposito jangka waktu lebih dari 12 bulan																	
10.	Sistem Informasi																	
11.	Dst.....																	
	Jumlah																	

Penjelasan Pencapaian Kinerja:

.....

.....

.....

²⁾ Contoh surat utang: SUN (Surat Utang Negara), pembelian obligasi, SBI (Sertifikat Bank Indonesia)

³⁾ Contoh surat modal: Saham

2) Pendanaan

a) Penerimaan Pendanaan

No	Jenis Pendanaan	Anggaran Tahun 20XX	Realisasi s.d.....	Capaian (%)	Ket
1.	Penarikan Pinjaman dari				
2.	Dst.....				
	Jumlah				

Penjelasan Pencapaian Kinerja:

.....

b) Pengeluaran Pendanaan

No	Jenis Pendanaan	Anggaran Tahun 20XX	Realisasi s.d.....	Capaian (%)	Ket
1.	Pembayaran utang kepada.....				
2.	Dst.....				

Penjelasan Pencapaian Kinerja:

.....

D. LAPORAN KEUANGAN TAHUN 20XX

1. NERACA

NERACA

PER 31 DESEMBER 20XX

NO.	KOMPONEN	ANGGARAN 20XX	REALISAS s/d JUNI	PROGNOSA TAHUN 20XX	SELISI %
I	ASET				
A	Aset Lancar				
1)	Kas dan setara kas				
2)	Investasi jangka pendek				
3)	Piutang usaha				
4)	Piutang Lain-lain				
5)	Persediaan				
6)	Uang muka				
7)	Pendapatan yang masih harus diterima				
8)	Dst.....				
	Jumlah Aset Lancar				
B	Investasi Jangka Panjang				
C	Aset Tetap				
1)	Tanah				
2)	Bangunan dan gedung				
3)	Peralatan dan mesin				
4)	Kendaraan				
5)	Perlengkapan dan peralatan kantor				
6)	Jalan, irigasi dan peralatan kantor				
	Jumlah Aset Tetap				
	Akumulasi Penyusutan				
	Nilai Buku Aset Tetap				

NO.	KOMPONEN	ANGGARAN 20XX	REALISAS s/d JUNI	PROGNOSA TAHUN 20XX	SELISI %
D	Aset Lain-Lain				
	1) Aset tak berwujud				
	2) Konstruksi dalam pengerjaan				
	Jumlah Aset Lain-Lain				
JUMLAH ASET (A + B + C+D)					
II KEWAJIBAN					
A	Kewajiban Jangka Pendek				
	1) Hutang usaha				
	2) Hutang pajak				
	3) Biaya yang masih harus dibayar				
	4) Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				
	5) Pendapatan yang diterima dimuka				
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek				
B	Kewajiban Jangka Panjang				
	1) Hutang jangka panjang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun				
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang				
JUMLAH KEWAJIBAN (A+B)					
III EKUITAS					
1)	Ekuitas tidak terikat				
	a. Ekuitas awal				
	b. Surplus (<i>deficit</i>) sampai dengan periode tahun lalu				
	c. Surplus (defisit) tahun berjalan				
2)	Terikat permanen				
3)	Terikat kontemporer				
4)	Hibah				
5)	Donasi				
	Jumlah Ekuitas				
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (II+III)					

2. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN 20XX

No.	KOMPONEN	ANGGARA TAHUN 20XX	REALISAS s/d 30 JUNI	PROGNOSA TAHUN 20XX	SELISI %
A.	PENDAPATAN BLUD				
	1) Jasa layanan				
	2) Hibah				
	3) Hasil kerjasama				
	4) Pendapatan dari APBD				
	5) Pendapatan dari APBN				
	6) Lain-lain pendapatan BLUD yang Sah				
	JUMLAH PENDAPATAN				

No.	KOMPONEN	ANGGARA TAHUN 20XX	REALISAS s/d 30 JUNI	PROGNOSA TAHUN 20XX	SELISI %
B	BIAYA OPERASIONAL				
	1) Biaya pelayanan				
	2) Biaya umum dan administrasi				
	JUMLAH BIAYA OPERASIONAL (1+2)				
	SURPLUS (DEFISIT) SETELAH BIAYA OPERASIONAL (A-B)				
C	PENDAPATAN NON OPERASIONAL				
D	BIAYA NON OPERASIONAL				
	SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS KEUNTUNGAN/KERUGIAN				
	SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS-POS LUAR BIASA				
	1) Pendapatan dari kejadian luar biasa				
	2) Biaya dari kejadian luar biasa				
	SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN BERSIH				

3. LAPORAN ARUS KAS

LAPORAN ARUS KAS TAHUN 20XX (Metode langsung)

No.	KOMPONEN	ANGGARA TAHUN 20XX	REALISAS s/d 30 JUNI	PROGNOSA TAHUN 20XX	SELISI %
A	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL				
	Arus Masuk				
	1 Jasa layanan				
	2 Hibah				
	3 Hasil kerjasama				
	4 Pendapatan dari APBD				
	5 Pendapatan dari APBN				
	Lain-lain pendapatan BLUD				
	6 yang Sah				
	Arus Keluar				
	1 Biaya pelayanan				
	biaya umum dan				
	2 Administrasi				
	3 Biaya lain-lain				
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional				
B	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
	Arus Masuk				
	1 Hasil penjualan aset tetap				
	2 Hasil investasi				
	Arus Keluar				
	1 Perolehan aset tetap				
	2 Pembelian investasi				
	3 Perolehan aset lainnya				
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi				

No.	KOMPONEN	ANGGARA TAHUN 20XX	REALISAS s/d 30 JUNI	PROGNOSA TAHUN 20XX	SELISI %
C	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
	1 Penerimaan pinjaman dari Arus Kas Keluar 1 Pembayaran pinjaman kepada				
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Kas dan Setara Kas Awal Kas dan Setara Kas Akhir				

**LAPORAN ARUS KAS
TAHUN 20XX
(Metode tidak langsung)**

No.	KOMPONEN	ANGGARAN TAHUN 20XX	REALISASI s/d 30 Juni	PROGNOSA TAHUN 20XX	SELISIH %
A	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL				
1	Surplus (defisit) Tahun Berjalan				
2	Penyesuaian ke Dasar Kas a Biaya penyusutan dan amortisasi b Kerugian penurunan nilai c Pembayaran bunga				
3	Perubahan Aset Lancar a Investasi jangka pendek b Piutang usaha c Piutang lain-lain d Persediaan e Uang muka f Pendapatan yang masih harus diterima				
4	Perubahan Kewajiban Jangka Pendek a Hutang usaha b Hutang pajak c Biaya yang masih harus dibayar d Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun e Pendapatan yang diterima di muka f Utang jangka pendek lainnya Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional				

No.	KOMPONEN	ANGGARAN TAHUN 20XX	REALISASI s/d 30 Juni	PROGNOSA TAHUN 20XX	SELISIH %
B	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
	Arus Masuk				
	1 Hasil penjualan aset tetap				
	2 Hasil investasi				
	3 Dst.				
	Arus Kas Keluar				
	1 Perolehan aset				
	2 Pembelian investasi				
	3 Perolehan aset lainnya				
	4 Dst.				
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi				
C	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
	Arus Kas Masuk				
	1 Penerimaan pinjaman dari				
	2 Dst.				
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Kas dan Setara Kas Awal Kas dan Setara Kas Akhir				

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Dijelaskan hal-hal yang ada relevansinya dengan laporan keuangan, antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Umum
- b. Kebijakan Akuntansi
- c. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan
- d. dan hal-hal lain yang dipandang perlu

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal dan Periode.....

- a. Umum
.....
.....
- b. Kebijakan Akuntansi *(mengikuti pedoman akuntansi yang berlaku)*
.....
.....
- c. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan.
(Sebagai contoh untuk pos kas dan setara kas dan piutang usaha).
 - 1) Kas dan setara kas, terdiri dari:

Uraian	Anggaran Tahun 20XX	Realisasi s.d	Prognosa	Selisih (%)
Kas di bendahara penerimaan				
Giro Bank				
Tabungan Bank ...				
Deposito Bank				
Jumlah				

2) Piutang usaha, terdiri dari:

Uraian	Anggaran Thn. 20XX	Realisasi s.d 	Prognosa	Selisih (%)
Piutang kepada				
Piutang kepada				
Jumlah				

d. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

.....
.....

BAB III
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 20XX+1

A. KONDISI LINGKUNGAN BLUD YANG MEMPENGARUHI

1. Faktor Internal

(memuat gambaran mengenai hasil kegiatan tahun yang akan datang secara keseluruhan yang berisi penjelasan mengenai pencapaian target-target kinerja dan uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja).

.....

.....

a. Kondisi Pelayanan

(Menggambarkan kondisi internal BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung yang akan mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya, antara lain berkaitan dengan kondisi:

- *pelayanan;*
 - *keuangan;*
 - *organisasi dan sumber daya manusia;*
 - *sarana dan prasarana)*
-
-

1) Kekuatan

- a) ...
- b) ...
- c) ...

2) Kelemahan

- a) ...
- b) ...
- c) ...

b. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1) Kekuatan

- a) ...
- b) ...
- c) ...

2) Kelemahan

- a) ...
- b) ...
- c) ...

c. Keuangan

1) Kekuatan

- a) ...
- b) ...
- c) ...

2) Kelemahan

- a) ...
- b) ...
- c) ...

d. Sarana dan Prasarana

1) Kekuatan

- a) ...
- b) ...
- c) ...

2) Kelemahan

- a) ...
- b) ...
- c) ...

2. Faktor Eksternal

a. Peraturan perundang-undangan yang terkait

.....
.....

b. Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah tentang pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi *Public Service Obligation* (PSO).

.....
.....

c. Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah tentang SDM/PNS

.....
.....

d. Perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat

.....
.....

e. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi

.....
.....

f. Keadaan persaingan dalam industri pelayanan yang sejenis

.....
.....

g. Keadaan persaingan dengan industri yang sejenis

.....
.....

h. Keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional

.....
.....

i. Perkembangan teknologi peralatan kedokteran

.....
.....

B. ASUMSI YANG DIGUNAKAN

1. ASPEK MAKRO

NO.	UNSUR	ASUMSI 20XX	PROGNOSA 20XX	KET.
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)			
2.	Tingkat Inflasi (%)			
3.	Pertumbuhan pasar (%)			
4.	Tingkat suku bunga pinjaman (%)			
5.	Kurs 1 US\$ (Rp)			
6.	dst.....			

(Memuat uraian tentang kondisi BLUD dalam konteks indikator ekonomi daerah setempat).

2. ASPEK MIKRO

NO.	UNSUR	ASUMSI 20XX	PROGNOSA 20XX	KET.
1.	Pembiayaan publik sebagai fungsi <i>PSO</i>			
2.	Perubahan tarif layanan			
3.	Pengembangan produk baru			
4.	Peningkatan volume layanan			
5.	Asumsi-asumsi dalam analisis rasio keuangan			

(Dijelaskan implikasi masing-masing asumsi terhadap rencana kinerja, berupa persentase, pertumbuhan, kenaikan/penurunan)

C. SASARAN, INDIKATOR, TARGET KINERJA DAN KEGIATAN

1.a Pelayanan (berdasarkan unit pelayanan)

NO	UNIT LAYANAN	SASARAN	INDIKATOR (SESUAI SPM)	TARGET	KEGIATAN
1	Kunjungan rawat jalan				
2	Kunjungan UGD				
3	Pasien rawat inap				
4	B O R				
5	L O S				

b. Pelayanan (berdasarkan unit pelayanan)

NO	UNIT LAYANAN	SASARAN	INDIKATOR (SESUAI SPM)	TARGET	KEGIATAN
1	Rawat jalan dan UGD				
2	Rawat inap				
3	<i>One day care</i>				
4	Tindakan kebidanan				
5	Penunjang medik				

2. Pendukung Pelayanan

NO	JENIS PELAYANAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN
1	Pelayanan data dan Informasi				
2	Pemeriksaan hygiene dan sanitasi tempat-tempat umum, tidak termasuk pemeriksaan laboratorium pada fasilitas pelayanan kesehatan swasta				

D. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN

1. Program

Program Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

2. Kegiatan

Kegiatan Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPTD

E. PERKIRAAN PENDAPATAN

1. Pendapatan BLUD

NO.	SUMBER PENDAPATAN	PROGNOSA TAHUN 20XX	PERKIRAAN TAHUN 20XX+1
1	Jasa pelayanan		
2	Hibah		
3	Kerjasama		
4	APBD		
5	APBN		
6	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah		
	Jumlah		

2. Pendapatan Jasa Layanan Per Unit

NO.	UNIT LAYANAN	PROGNOSA TAHUN 20XX	PERKIRAAN TAHUN 20XX+1
1	Rawat jalan dan UGD		
2	Rawat inap		
3	One day care		
4	Tindakan kebidanan		
5	Penunjang medik		
	Jumlah Pendapatan Pelayanan		
1	Pelayanan data dan informasi		
2	Pemeriksaan hygiene dan sanitasi tempat-tempat umum, tidak termasuk pemeriksaan laboratorium pada fasilitas pelayanan kesehatan swasta		
	Jumlah Pendapatan Pendukung Pelayanan		
	JUMLAH PENDAPATAN JASA LAYANAN		

Penjelasan Pencapaian Kinerja:

.....

F. PERKIRAAN BIAYA

(Perkiraan biaya BLUD berasal dari biaya kegiatan masing-masing unit layanan, jumlah unit layanan disesuaikan dengan kondisi masing-masing BLUD, contoh berikut ini adalah biaya untuk unit layanan IGD):

1. Biaya Berdasarkan Unit Pelayanan

Contoh (1): Unit Pelayanan Rawat Jalan dan UGD

Program : Peningkatan Pelayanan				
Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat				
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja
<i>Input</i>	1. SDM 2. Sarana/Prasaana Alat 3. BHP 4. Biaya			
<i>Output</i>	1. Pelayanan Kunjungan Tindakan Non Operatif Tindakan Operatif Asuhan Keperawatan Tindakan Khusus Elektromedik 2. Keuangan Administrasi/Karcis Tindakan Non Operatif Tindakan Operatif Asuhan Keperawatan Tindakan Khusus Elektromedik			
<i>Outcome</i> (Dapat diisi dengan target pencapaian SPM)			
ANGGARAN BELANJA				
KOMPONEN BIAYA	RINCIAN BIAYA (Satuan X Harga)			JUMLAH ANGGARAN (RP)
	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5
I. Biaya Pelayanan				
A. Biaya pegawai				
.....				
B. Biaya bahan				
.....				
C. Biaya jasa pelayanan				
.....				
D. Biaya pemeliharaan				
.....				
E. Biaya barang dan jasa				
.....				
F. Biaya depresiasi				
.....				
G. Biaya pelayanan lainnya				
.....				
II. Biaya Umum dan Administrasi				
A. Biaya pegawai				
.....				
B. Biaya administrasi kantor				
.....				
C. Biaya pemeliharaan				
.....				
D. Biaya barang dan jasa				
.....				
E. Biaya promosi				
.....				
F. Biaya depresiasi				
.....				

1	2	3	4	5
G. Biaya umum dan administrasi lainnya				
.....				
III. Biaya Non Operasional				
A. Biaya bunga				
.....				
B. Biaya administrasi bank				
.....				
C. Biaya kerugian penjualan aset tetap				
.....				
D. Biaya kerugian penurunan nilai Kurs				
.....				
E. Biaya non operasional lainnya				
.....				
Jumlah Biaya (I+II+III)				

Contoh (2) : Unit Pelayanan Rawat Inap

Program	Peningkatan Pelayanan			
Kegiatan	Peningkatan Pelayanan Instalasi Laboratorium			
Indikator	Tolok ukur kinerja			Target kinerja
<i>Input</i>	1. SDM 2. Sarana/Prasaana Alat 3. BHP 4. Biaya			
<i>Output</i>	1. Pelayanan a. Pemeriksaan Patologi Klinik b. Pemeriksaan Patologi Anatomi c. Pemeriksaan Parasitologi Klinik d. Pemeriksaan Mikrobiologi 2. Keuangan a. Pemeriksaan Patologi Klinik b. Pemeriksaan Patologi Anatomi c. Pemeriksaan Parasitologi Klinik d. Pemeriksaan Mikrobiologi			
<i>Outcome</i> (Dapat diisi dengan target pencapaian SPM)			
ANGGARAN BELANJA				
KOMPONEN BIAYA	RINCIAN BIAYA (satuan x harga)			JUMLAH ANGGARAN (RP)
	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5
I. Biaya Pelayanan				
A. Biaya pegawai				
.....				
B. Biaya bahan				
.....				
C. Biaya jasa pelayanan				
.....				
D. Biaya pemeliharaan				
.....				

1	2	3	4	5
E. Biaya barang dan jasa				
.....				
F. Biaya depresiasi				
.....				
G. Biaya pelayanan lainnya				
.....				
II. Biaya Umum dan Administrasi				
A. Biaya pegawai				
.....				
B. Biaya administrasi kantor				
.....				
C. Biaya pemeliharaan				
.....				
D. Biaya barang dan jasa				
.....				
E. Biaya promosi				
.....				
F. Biaya depresiasi				
.....				
G. Biaya umum dan administrasi lainnya				
.....				
III. Biaya Non Operasional				
A. Biaya bunga				
.....				
B. Biaya administrasi bank				
.....				
C. Biaya kerugian penjualan aset tetap				
.....				
D. Biaya kerugian penurunan nilai Kurs				
.....				
E. Biaya non operasional lainnya				
.....				
Jumlah Biaya (I+II+III)				

2. Total Biaya Operasional dan Non Operasional

NO.	UNIT KERJA/PELAYANAN	BIAYA OPERASIONAL		BIAYA NON OPERASIONAL	JUMLAH
		Biaya Pelayanan	Biaya Umum dan Adm.		
1	2	3	4	5	6
1.	UNIT PELAYANAN				
a.	Rawat jalan dan UGD				
b.	Rawat inap				
c.	One day care				
d.	Tindakan kebidanan				
e.	Penunjang medik				

1	2	3	4	5	6
2.	UNIT PENDUKUNG PELAYANAN				
a.	Pelayanan data dan informasi				
b.	Pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi tempat-tempat umum, tidak termasuk pemeriksaan laboratorium pada fasilitas pelayanan kesehatan swasta				
TOTAL BIAYA					

3. Biaya Berdasarkan Komponen dan Anggarannya

(Dalam hal terdapat kesulitan untuk pengelompokan biaya pada setiap unit layanan, dapat menggunakan format sebagai berikut):

KOMPONEN BIAYA	JUMLAH ANGGARAN (RP)
I. Biaya Operasional	
A. Biaya Pelayanan	
1. Biaya pegawai	
2. Biaya bahan	
3. Biaya jasa pelayanan	
4. Biaya pemeliharaan	
5. Biaya barang dan jasa	
6. Biaya depresiasi dan amortisasi	
7. Biaya pelayanan lainnya	
B. Biaya Umum dan Administrasi	
1. Biaya pegawai	
2. Biaya administrasi kantor	
3. biaya pemeliharaan	
4. Biaya barang dan jasa	
5. Biaya promosi	
6. Biaya depresiasi dan amortisasi	
7. Biaya umum dan administrasi lainnya	
II. Biaya Non Operasional	
1. Biaya bunga	
2. Biaya administrasi bank	
3. Biaya pelepasan aset tetap	
4. Kerugian penurunan nilai Kurs	
5. Biaya non operasional lainnya	
Jumlah Biaya (I+II)	

G. PERKIRAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN INVESTASI

1. Perkiraan Penerimaan Investasi

NO	JENIS INVESTASI	PROGNOSA TAHUN 20XX	PERKIRAAN TAHUN 20XX+1	KET
1.	Pelepasan aset			
a.	Kendaraan			
b.	Mesin			
2.	Pencairan investasi			
a.	Pencairan deposito			
b.	Penjualan surat berharga			

2. Pengeluaran Investasi

Komponen Pengeluaran Investasi	Rincian Pengeluaran			Jumlah Pengeluaran (Rp)
	Jumlah	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5 = (2X4)
1. Pembelian tanah				
2. Pembelian peralatan dan mesin				
3. Pembangunan gedung dan bangunan				
4. Pembelian kendaraan				
5. Pembelian peralatan kantor				
6. Pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan				
7. Pembelian surat berharga jangka panjang				
8. Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi				
9. Pembangunan/pengembangan sarana fisik lainnya				
Jumlah Pengeluaran Investasi				

H. PERKIRAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PENDANAAN

1. Perkiraan Penerimaan Pendanaan

NO	JENIS PENDANAAN	PROGNOSA TAHUN 20XX	PERKIRAAN TAHUN 20XX+1	KET
1.	Penarikan Pinjaman dari			
Jumlah				

2. Pengeluaran Pendanaan

Komponen Pengeluaran Pendanaan	Rincian Pengeluaran			Jumlah Pengeluaran (Rp)
	Jumlah	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5 = (2X4)
1. Pengeluaran pembayaran hutang				
a. Pokok.....				
b. bunga dan administrasi....				
c. Komisi, provisi, denda				
2. Dst				
.....				
Jumlah				

I. ANGGARAN BLUD

(Anggaran BLUD merupakan penjabaran program dan kegiatan dalam satuan uang berdasarkan pendapatan, biaya, dan pengeluaran yang dananya bersumber dari seluruh pendapatan BLUD).

1. Anggaran Pendapatan BLUD Berdasarkan Sumber Pendapatan (Basis Akrual)

(dalam ribuan rupiah)

NO	URAIAN	PROGNOSA TAHUN 20XX	PROYEKSI TAHUN 20XX+1	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015	SELISIH (%)
1	2	3	4	5	6=(4-3)/3
1.	Pendapatan jasa layanan				
	a.				
	b.				
2.	Hibah				
	a.				
	b.				
3.	Hasil kerjasama				
	a. Hasil kerjasama dengan				
	b. Hasil kerjasama dengan				
	c. Dst ⁴⁾				
4.	Pendapatan dari APBD				
	a. Operasional				
	b. Investasi				
5.	Pendapatan dari APBN				
	a. Operasional				
	b. Investasi				
6.	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah				
	a. keuntungan penjualan aset.				
	b. hasil pemanfaatan kekayaan.				
	c. jasa giro/bunga.				
	d. dividen.				
	Jumlah				

⁴⁾ dimungkinkan ada lampiran tersendiri

2. Anggaran Biaya (Basis Akrual)

a. Anggaran Biaya Berdasarkan Sumber

No.	ALOKASI BIAYA	SUMBER DANA TAHUN 20XX+1						JUMLAH
		PELAYANAN	APBD	APBN	HIBAH	KERJASAMA	LAIN-LAIN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	BIAYA OPERASIONAL							
A	BIAYA PELAYANAN							
1	Biaya Pegawai							
	1.1. Gaji dan Tunjangan Non PNS							
	1.2. Tambahan Penghasilan Non PNS							
	1.3. Lembur							
2	Biaya Bahan							
	2.1. Biaya Obat							
	2.2. Biaya Alkes							
	2.3. Biaya bahan dan alat laboratorium							
	2.4. Biaya bahan dan alat radiologi							
	2.5. Biaya bahan makan pasien							
3	Biaya Jasa Pelayanan							
	3.1. Biaya jasa pelayanan medis							
	3.2. Biaya jasa pelayanan paramedis/non medis							
	3.3. Biaya jasa pelayanan hari raya karyawan							
	3.4. Biaya jasa insentif							
	3.5. Biaya jasa pembinaan							
4	Biaya Pemeliharaan							
	4.1. Biaya pemeliharaan dan kalibrasi alat medik							
5	Biaya Barang dan Jasa							
	5.1. Biaya perlengkapan ruang pasien							
	5.2. Biaya cetakan rekam medis							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Biaya Depresiasi							
7	Biaya Pelayanan Lainnya							
	7.1. Biaya Pelayanan lainnya							
	7.2. Biaya							
B	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI							
1	Biaya Pegawai							
	1.1. Gaji dan Tunjangan PNS							
	1.2. Tambahan Penghasilan PNS							
	1.3.							
2	Biaya Adm. Kantor							
	2.1. Biaya Benda pos dan pengiriman							
	2.2. Biaya ATK							
	2.3. Biaya cetakan dan penggandaan							
	2.4. Biaya pakaian dinas, pakaian kerja dan atribut							
	2.5. Biaya makanan dan minuman kantor							
	2.6. Biaya makanan dan minuman tamu							
3	Biaya pemeliharaan							
	3.1. Biaya pemeliharaan instalasi dan jaringan							
	3.2. Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan							
	3.3. Biaya pemel. alat transportasi & komunikasi							
	3.4. Biaya pemeliharaan Teknologi Informasi							
	3.5. Biaya pemel. sarana & prasarana fisik lainnya							
4	Biaya Barang dan Jasa							
	4.1. Biaya bahan, alat dan pemeriksaan sanitasi							
	4.2. Biaya bahan pembersih dan alat kebersihan							
	4.3. Biaya bahan baker							
	4.4. Biaya gas dapur							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Kerugian pelepasan aset tetap							
	1.1. Biaya kerugian pelepasan aset tetap							
	1.2.							
4	Kerugian penurunan nilai							
	1.1. Biaya kerugian penurunan nilai							
	1.2.							
5	Biaya non operasional lainnya							
	1.1. Biaya non operasional lainnya							
	1.2.							
TOTAL BIAYA								

b. Anggaran Biaya Berdasarkan Jenis Belanja

No	JENIS BIAYA	JENIS ANGGARAN TAHUN 20XX+1			TOTAL BIAYA
		Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	
1	2	3	4	5	6
I. BIAYA OPERASIONAL					
A. BIAYA PELAYANAN					
1	Biaya Pegawai				
	1.1. Gaji dan Tunjangan Non PNS				
	1.2. Tambahan Penghasilan Non PNS				
	1.3. Lembur				
2	Biaya Bahan				
	2.1. Biaya Obat				
	2.2. Biaya Alkes				
	2.3. Biaya bahan dan alat laboratorium				
	2.4. Biaya bahan dan alat radiologi				

1	2	3	4	5	6
	2.5. Biaya bahan makan pasien				
3	Biaya Jasa Pelayanan				
	3.1. Biaya jasa pelayanan medis				
	3.2. Biaya jasa pelayanan paramedis/non medis				
	3.3. Biaya jasa pelayanan hari raya karyawan				
	3.4. Biaya jasa insentif				
	3.5. Biaya jasa pembinaan				
4	Biaya Pemeliharaan				
	4.1. Biaya pemeliharaan dan kalibrasi alat medik				
5	Biaya Barang dan Jasa				
	5.1. Biaya perlengkapan ruang pasien				
	5.2. Biaya cetakan rekam medis				
6	Biaya Depresiasi				
7	Biaya Pelayanan Lainnya				
	7.1. Biaya Pelayanan lainnya				
	7.2. Biaya				
B	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI				
1	Biaya Pegawai				
	1.1. Gaji dan Tunjangan PNS				
	1.2. Tambahan Penghasilan PNS				
	1.3.				
2	Biaya Administrasi Kantor				
	2.1. Biaya Benda pos dan pengiriman				
	2.2. Biaya ATK				
	2.3. Biaya cetakan dan penggandaan				

1	2	3	4	5	6
	2.4. Biaya pakaian dinas, pakaian kerja dan atribut				
	2.5. Biaya makanan dan minuman kantor				
	2.6. Biaya makanan dan minuman tamu				
3	Biaya pemeliharaan				
	3.1. Biaya pemeliharaan instalasi dan jaringan				
	3.2. Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan				
	3.3. Biaya pemel. alat transportasi & komunikasi				
	3.4. Biaya pemeliharaan Teknologi Informasi				
	3.5. Biaya pemel. sarana & prasarana fisik lainnya				
4	Biaya Barang dan Jasa				
	4.1. Biaya bahan, alat dan pemeriksaan sanitasi				
	4.2. Biaya bahan pembersih dan alat kebersihan				
	4.3. Biaya bahan bakar				
	4.4. Biaya gas dapur				
	4.5. Biaya Jasa konsultan dan pihak ketiga lainnya				
	4.6. Biaya langganan listrik, air, telp., faks & Internet				
	4.7. Biaya Pengembangan SIM dan TI				
	4.8. Biaya Langganan Media				
	4.9. Biaya Jasa Kebersihan				
	4.10. Biaya persediaan alat listrik dan elektronik				
	4.11. Biaya Peralatan dan bahan pustaka				
	4.12. Biaya sewa				
	4.13. Biaya representasi				
5	Biaya Promosi				
	5.1. Biaya pemasaran dan publikasi				
	5.2. Biaya Komunikasi cepat dan mediamasa				
6	Biaya Depresiasi				

1	2	3	4	5	6
7	Biaya Umum dan Administrasi Lainnya				
	7.1. Biaya premi asuransi				
	7.2. Biaya perijinan dan legalisasi				
	7.3. Biaya keamanan dan ketertiban				
	7.4. Biaya jasa sewa				
				
II. BIAYA NON OPERASIONAL					
1	Biaya Bunga				
	1.1. Biaya bunga Bank				
	1.2. Biaya bunga deposito				
	1.3.				
2	Biaya administrasi bank				
	2.1. Biaya administrasi bank				
	2.2. Biaya				
3	Kerugian penjualan aset tetap				
	3.1. Biaya kerugian penjualan aset tetap				
	3.2.				
4	Kerugian penurunan nilai				
	4.1. Biaya kerugian penurunan nilai				
	4.2.				
5	Biaya non operasional lainnya				
	5.1. Biaya non operasional lainnya				
	5.2.				
TOTAL					

3. Anggaran Pendapatan (Basis Kas)

NO	URAIAN	PROGNOSA TAHUN 20XX	PROYEKSI TAHUN 20XX+1	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015	SELISIH (%)
1	2	3	4	5	6=(4-3)/3
1.	Pendapatan jasa layanan				
				
2.	Pendapatan hasil kerjasama				
				
				
3.	Pendapatan hibah				
				
				
4.	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah				
				
				
	Jumlah				

4. Anggaran Belanja (Basis Kas)

No.	ALOKASI BIAYA	SUMBER DANA TAHUN 20XX+1						
		JASA LAYANAN	APBD	APBN	HIBAH	KERJASAMA	LAIN-LAIN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	BIAYA OPERASIONAL							
A	BIAYA PELAYANAN							
1	Biaya Pegawai							
	1.1. Gaji dan Tunjangan Non PNS							
	1.2. Tambahan Penghasilan Non PNS							
	1.3. Lembur							
2	Biaya Bahan							
	2.1. Biaya Obat							
	2.2. Biaya Alkes							
	2.3. Biaya bahan dan alat laboratorium							
	2.4. Biaya bahan dan alat radiologi							
	2.5. Biaya bahan makan pasien							
3	Biaya Jasa Pelayanan							
	3.1. Biaya jasa pelayanan medis							
	3.2. Biaya jasa pelayanan paramedis/non medis							
	3.3. Biaya jasa pelayanan hari raya karyawan							
	3.4. Biaya jasa insentif							
	3.5. Biaya jasa pembinaan							
4	Biaya Pemeliharaan							
	4.1. Biaya pemeliharaan dan kalibrasi alat medik							
5	Biaya Barang dan Jasa							
	5.1. Biaya perlengkapan ruang pasien							
	5.2. Biaya cetakan rekam medis							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Biaya Depresiasi							
7	Biaya Pelayanan Lainnya							
	7.1. Biaya pelayanan lainnya							
	7.2. Biaya							
B	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI							
1	Biaya Pegawai							
	1.1. Gaji dan Tunjangan PNS							
	1.2. Tambahan Penghasilan PNS							
	1.3.							
2	Biaya Adm. Kantor							
	2.1. Biaya Benda pos dan pengiriman							
	2.2. Biaya ATK							
	2.3. Biaya cetakan dan penggandaan							
	2.4. Biaya pakaian dinas, pakaian kerja dan atribut							
	2.5. Biaya makanan dan minuman kantor							
	2.6. Biaya makanan dan minuman tamu							
3	Biaya pemeliharaan							
	3.1. Biaya pemeliharaan instalasi dan jaringan							
	3.2. Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan							
	3.3. Biaya pemel. alat transportasi & komunikasi							
	3.4. Biaya pemeliharaan Teknologi Informasi							
	3.5. Biaya pemel. sarana & prasarana fisik lainnya							
4	Biaya Barang dan Jasa							
	4.1. Biaya bahan, alat dan pemeriksaan sanitasi							
	4.2. Biaya bahan pembersih dan alat kebersihan							
	4.3. Biaya bahan baker							
	4.4. Biaya gas dapur							
	4.5. Biaya Jasa konsultan dan pihak ketiga lainnya							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Kerugian pelepasan aset tetap							
	3.1. Biaya kerugian pelepasan aset tetap							
	3.2.							
4	Kerugian penurunan nilai							
	4.1. Biaya kerugian penurunan nilai							
	4.2.							
5	Biaya non operasional lainnya							
	5.1. Biaya non operasional lainnya							
	5.2.							
	TOTAL BIAYA							

5. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Investasi (Basis Kas)

a. Anggaran Penerimaan Investasi

NO	JENIS INVESTASI	PROGNOSA TAHUN 20XX	PROYEKSI TAHUN 20XX+1	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015
1.	Pelepasan aset			
a.	Kendaraan			
b.	Mesin			
c.	Dst.....			
2.	Pencairan investasi			
a.	Pencairan deposito			
b.	Penjualan surat berharga			
c.	Dst.....			
	Jumlah			

b. Anggaran Pengeluaran Investasi berdasar Sumber Dana

No.	KOMPONEN BIAYA	SUMBER DANA TAHUN 20XX+1						JUMLAH
		JASA PELAYANAN	HIBAH	KERJASAMA	APBD	APBN	LAIN-LAIN	
1	Perolehan Tanah							
2	Perolehan Peralatan dan Mesin							
3	Perolehan Gedung dan Bangunan							
4	Perolehan Kendaraan							
5	Perolehan Perlengkapan dan Peralatan Kantor							
6	Perolehan jalan, irigasi dan jaringan							
7	Pengeluaran pembelian surat berharga							
8	Pengeluaran pembangunan/pengembangan sistem informasi							
9	Pengeluaran pembangunan/pengembangan sarana fisik lainnya							

c. Anggaran Pengeluaran Investasi berdasar Jenis Belanja

No.	JENIS PENGELUARAN	JENIS BELANJA			
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG/JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH
1	Perolehan Tanah				
2	Perolehan Peralatan dan Mesin				
3	Perolehan Gedung dan Bangunan				
4	Perolehan Kendaraan				
5	Perolehan Perlengkapan dan Peralatan Kantor				
6	Perolehan jalan, irigasi dan jaringan				
7	Pengeluaran pembelian surat berharga				
8	Pengeluaran pembangunan/pengembangan sistem informasi				
9	Pengeluaran pembangunan/pengembangan sarana fisik lainnya				
	JUMLAH				

6. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan

a. Anggaran Penerimaan Pendanaan

NO	JENIS PENDANAAN	PROGNOSA TAHUN 20XX	PROYEKSI TAHUN 20XX+1	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015
1.	Penarikan Pinjaman dari			
2.	Dst.....			

b. Anggaran Pengeluaran Pendanaan

No.	KOMPONEN BIAYA	SUMBER DANA TAHUN 20XX+1						JUMLAH
		JASA PELAYANAN	HIBAH	KERJASAMA	APBD	APBN	LAIN-LAIN	
1	Pembayaran Pinjaman							
	a. Pokok							
	b. Bunga dan Administrasi							
	c. Provisi, denda,							
2	Dst.....							
							

c. Anggaran Pengeluaran Pendanaan berdasar Jenis Belanja dan Jenis Pembiayaan

No	Jenis Pengeluaran	JENIS ANGGARAN			JENIS PEMBIAYAAN		Total Biaya
		Belanja pegawai	Barang & Jasa	Modal	Penerimaan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan	
1.	Pembayaran pinjaman						
a.	Pokok.....						
b.	Bunga dan administrasi						
c.	Komisi, provisi, denda.....						
2.	Dst.....						
	JUMLAH						

J. AMBANG BATAS RBA

Besaran ambang batas dalam RBA ini adalah% dari anggaran belanja yang bersumber dari pendapatan jasa layanan.

(Contoh penentuan ambang batas RBA Tahun Anggaran 2012, dibuat pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk Tahun Anggaran 2012:

Tabel berikut adalah data Anggaran Pendapatan dan Realisasi/Prognosa BLUD yang bersumber dari Jasa Layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, Tahun Anggaran 2009 s.d 2011).

(dalam juta)

No	Tahun	Anggaran	Realisasi/Prognosa	Selisih	
				Rp	%
1	2	3	4	5 =(4-3)	6 =(5/3X100)
1	2009	5.000	7.000	2.000	40,00
2	2010	9.000	11.000	3.000	33,33
3	2011	11.000	15.000	4.000	36,36
Jumlah					109,69

(Berdasarkan tabel, didapat besaran ambang batas RBA tahun anggaran 2012 = $(109,69 : 3) = 36,56\%$ dari rencana biaya yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, Tahun Anggaran 2012.

Untuk itu, apabila rencana biaya bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, Tahun Anggaran 2012 diperkirakan = Rp 13.000.000.000,- maka besaran ambang batas = $36,56\% \times \text{Rp } 13.000.000.000,- = \text{Rp } 4.752.800.000,-$

Dengan demikian, apabila realisasi biaya BLUD masih dibawah (Rp 13.000.000.000,- + Rp 4.752.800.000,-) = Rp 17.752.800.000,- BLUD dapat melaksanakan belanja dengan melaporkan kepada PPKD. Sedangkan apabila melebihi Rp 17.752.800.000,- wajib mendapatkan persetujuan dari Bupati terlebih dahulu dan dituangkan dalam bentuk peraturan Bupati).

BAB IV
PROYEKSI KEUANGAN TAHUN 20XX+1

Langkah-langkah dalam menyusun proyeksi laporan keuangan BLUD:

1. *Dapatkan prognosa laporan keuangan Tahun Anggaran 20XX sebagaimana tersaji pada Bab II, terdiri dari prognosa :*
 - a. *Neraca;*
 - b. *Laporan Operasional;*
 - c. *Laporan Arus Kas; dan*
 - d. *Catatan atas Laporan Keuangan.*
2. *Dapatkan kebijakan atau target-target, antara lain :*
 - a. *Piutang akhir tahun yang dianggarkan;*
 - b. *Persediaan akhir tahun yang dianggarkan; dan*
 - c. *Hutang akhir tahun yang dianggarkan.*
3. *Dapatkan dan analisis rencana kegiatan (usaha) pada tahun yang dianggarkan, berupa aktivitas-aktivitas (data dari BAB III) :*
 - a. *Aktivitas Operasional, terdiri dari:*
 - 1) *Aktivitas yang berpengaruh pada akun pendapatan (akrual);*
 - 2) *Aktivitas yang berpengaruh pada akun biaya (akrual);*
 - 3) *Aktivitas yang berpengaruh pada kewajiba jangka pendek; dan*
 - 4) *Aktivitas lainnya yang berpengaruh pada aset lancar.*
 - b. *Aktivitas Investasi, terdiri dari:*
 - 1) *Pembelian/ Belanja Aset Tidak Lancar;*
 - 2) *Penerimaan hasil investasi; dan*
 - 3) *Penjualan/ Penghentian Investasi.*
 - c. *Aktivitas Pendanaan*
Aktivitas yang berpengaruh pada keputusan keuangan (sumber dana eksternal), seperti penerimaan dan pembayaran utang.
4. *Siapkan proyeksi jurnal transaksi tahun yang dianggarkan, untuk mencatat proyeksi aktivitas operasional, investasi dan pendanaan sebagaimana direncanakan pada butir 2 dan 3.*
5. *Siapkan Worksheet (Kertas Kerja) Laporan Keuangan yang diproyeksikan, baik kertas kerja Laporan Operasional maupun kertas kerja Neraca.*
6. *Siapkan proyeksi jurnal penyesuaian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan, antara lain :*
 - a. *Penyisihan piutang;*
 - b. *Pendapatan yang masih harus diterima;*
 - c. *Penurunan nilai persediaan;*
 - d. *Penyusutan dan amortisasi;*
 - e. *Penurunan nilai aset tetap;*
 - f. *Provisi/kewajiban estimasian;*
 - g. *Biaya yang masih harus dibayar; dan*
 - h. *Reklasifikasi akun (misalnya utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun).*
7. *Menyajikan Laporan Keuangan yang diproyeksikan komparatif dengan Laporan Keuangan prognosa, dengan urutan penyelesaian:*
 - a. *Proyeksi Neraca :*
 - 1) *Diperoleh dari kertas kerja kolom neraca;*
 - 2) *Sajikan sesuai format neraca.*
 - b. *Proyeksi Laporan Operasional:*
 - 1) *Diperoleh dari kertas kerja kolom Laporan Operasional;*
 - 2) *Kolom kredit merupakan pos-pos pendapatan dan keuntungan;*
 - 3) *Kolom debit merupakan pos-pos biaya dan kerugian;*
 - 4) *Sajikan sesuai format laporan operasional.*
 - c. *Laporan Arus Kas :*
 - 1) *Menggunakan metode tidak langsung; atau*
 - 2) *Menggunakan metode langsung.*
 - d. *Catatan atas Proyeksi Laporan Keuangan :*
 - 1) *Cukup menjelaskan pos-pos proyeksi laporan keuangan; ditambah*
 - 2) *Rincian pos-pos (optional).*

A. NERACA

PROYEKSI NERACA
PER 31 DESEMBER 20XX+1

(dalam ribuan rupiah)

KOMPONEN	PROGNOSA PER 31 DESEMBER TAHUN 20XX (Rp)	PROYEKSI PER 31DESEMBER TAHUN 20XX+1 (Rp)	PERUBAHAN	
			JUMLAH Rp	%
1	2	3	4	5
I. ASET				
A. Aset Lancar				
1. Kas dan setara kas				
2. Investasi jangka pendek				
3. Piutang usaha				
4. Piutang lain-lain				
5. Persediaan				
6. Uang muka				
7. Pendapatan yang masih harus diterima				
Jumlah Aset Lancar				
B. Investasi Jangka Panjang				
C. Aset Tetap				
1. Tanah				
2. Peralatan dan mesin				
3. Gedung dan bangunan				
4. Kendaraan				
5. Perlengkapan dan peralatan kantor				
6. Jalan, irigasi, dan jaringan				
Jumlah Aset Tetap				
Akumulasi Penyusutan				
Nilai Buku Aset Tetap				
D. Aset Lain-lain.				
1. Aset tak berwujud				
2. Konstruksi dalam pengerjaan				
Jumlah Aset Lain-lain				
Jumlah Aset (A+B+C+D)				
II. KEWAJIBAN				
A. Kewajiban Jangka Pendek				
1. Utang usaha				
2. Utang pajak				
3. Biaya yang masih harus dibayar				
4. Utang jangka panjang				
5. Pendapatan yang diterima di muka				
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek				
B. Kewajiban Jangka Panjang.				
1. Utang jangka panjang				
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang				
Jumlah Kewajiban (A+B)				

1	2	3	4	5
III. EKUITAS				
1. Ekuitas tidak terikat				
a. Ekuitas Awal				
b. Surplus (Defisit) s.d periode tahun lalu				
c. Surplus (Defisit) tahun berjalan				
2. Terikat Permanen ⁵⁾				
3. Terikat Temporer ⁶⁾				
4. Hibah ⁷⁾				
5. Donasi				
Jumlah Ekuitas				
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (II + III)				

B. LAPORAN OPERASIONAL

PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 20XX+1

(dalam ribuan rupiah)

KOMPONEN	PROGNOSA TAHUN 20XX (Rp)	PROYEKSI TAHUN 20XX+1 (Rp)	PERUBAHAN	
			JUMLAH Rp	%
1	2	3	4	5
A. Pendapatan				
1. Jasa layanan				
2. Hibah				
3. Hasil Kerjasama				
4. Pendapatan dari APBD				
5. Pendapatan dari APBN				
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah				
Jumlah Pendapatan (1+2+3+4+5+6)				
B. Biaya Operasional				
1. Biaya pelayanan				
2. Biaya umum dan administrasi				
Jumlah Biaya Operasional (1+2)				
Surplus (Defisit) Setelah Biaya Operasional (A-B)				
C. Pendapatan Non Operasional				
D. Biaya Non Operasional				
Surplus (Defisit) sebelum pos Keuntungan/Kerugian				
Surplus/(Defisit) Sebelum Pos-Pos Luar Biasa				

⁵⁾ Seperti: APBD yang untuk Investasi.

⁶⁾ Seperti: APBD utk Gaji, operasional.

⁷⁾ Hibah merupakan pemberian yang berasal dari pemerintah/pemerintah daerah lain.

1	2	3	4	5
Surplus / (Defisit) Sebelum Pos-Pos Luar Biasa				
1. Pendapatan dari kejadian luar biasa				
2. Biaya dari kejadian luar biasa				
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan Bersih				

C. LAPORAN ARUS KAS

PROYEKSI LAPORAN ARUS KAS
TAHUN 20XX+1
(Metode langsung)

(dalam ribuan rupiah)

KOMPONEN	PROGNOSA TAHUN 20XX (Rp)	PROYEKSI TAHUN 20XX+1 (Rp)	PERUBAHAN	
			Rp	%
1	2	3	4	5
A. Arus Kas Dari Aktivitas Operasional				
Arus Kas Masuk				
1. Jasa layanan				
2. Hibah				
3. Hasil Kerjasama				
4. Pendapatan dari APBD				
5. Pendapatan dari APBN				
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah				
Arus Kas Keluar				
1. Biaya layanan				
2. Biaya umum dan administrasi				
3. Biaya lain-lain				
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional				
B. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi				
Arus Kas Masuk				
1. Hasil penjualan aset tidak lancar ⁸⁾				
2. Hasil investasi				
Arus Kas Keluar				
1. Perolehan aset tetap				
2. Pembelian investasi				
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi				
C. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan				
Arus Kas Masuk				
1. Penerimaan Pinjaman				
Arus Kas Keluar				
1. Pembayaran pinjaman				

⁸⁾ Termasuk di dalamnya investasi jangka panjang (surat utang atau surat ekuitas/saham)

1	2	3	4	5
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan				
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih				
Kas dan Setara Kas Awal				
Kas dan Setara Kas Akhir				

**PROYEKSI LAPORAN ARUS KAS
TAHUN 20XX+1
(Metode tidak langsung)**

(dalam ribuan rupiah)

KOMPONEN	PROGNOSA TAHUN 20XX (Rp)	PROYEKSI TAHUN 20XX+1 (Rp)	PERUBAHAN	
			Rp	%
1	2	3	4	5
A. Arus Kas Dari Aktivitas Operasional				
1. Surplus (Defisit) tahun berjalan				
2. Penyesuaian ke dasar kas				
a. Biaya penyusutan dan amortisasi				
b. Kerugian penurunan nilai				
c. Pembayaran bunga				
3. Perubahan aset lancar				
a. Investasi jangka pendek				
b. Piutang usaha				
c. Piutang lain-lain				
d. Persediaan				
e. Uang muka				
f. Pendapatan yang masih harus diterima				
4. Perubahan kewajiban jangka pendek				
a. Utang Usaha				
b. Utang Pajak				
c. Biaya yang masih harus dibayar				
d. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				
e. Pendapatan yang diterima di muka				
f. Utang jangka pendek lainnya				
Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasional				

1	2	3	4	5
B. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi				
Arus Kas Masuk				
1. Hasil penjualan aset tidak lancar				
2. Hasil investasi				
Arus Kas Keluar				
1. Perolehan aset tetap				
2. Pembelian investasi				
3. Perolehan aset lainnya				
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi				
C. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan				
Arus Kas Masuk				
1. Penerimaan pinjaman				
2. Dst				
Arus Kas Keluar				
1. Pembayaran pinjaman				
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan				
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih				
Kas dan Setara Kas Awal				
Kas dan Setara Kas Akhir				

D. CATATAN ATAS PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN.

CATATAN ATAS PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 20XX+1

Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan, memuat informasi lebih lanjut tentang:

1. *Penjelasan Atas Informasi-Informasi Keuangan*

Menjelaskan pos-pos laporan keuangan termasuk rincian dan pengungkapan yang memadai (disclosure). Sebagai contoh untuk pos kas dan setara kas, dan piutang usaha.

a. *Kas dan setara kas, terdiri dari:*

KOMPONEN	PROGNOSA PER 31 DESEMBER TAHUN 20XX (Rp)	PROYEKSI PER 31 DESEMBER TAHUN 20XX+1 (Rp)
1	2	3
<i>Kas di bendahara penerimaan</i>		
<i>Kas di bendahara pengeluaran</i>		
<i>Giro Bank</i>		
<i>Giro Bank</i>		
<i>Tabungan Bank</i>		
<i>Tabungan Bank</i>		
<i>Deposito Bank</i>		
<i>Deposito Bank</i>		
JUMLAH		

b. Piutang usaha, terdiri dari:

KOMPONEN	PROGNOSA PER 31 DESEMBER TAHUN 20XX (Rp)	PROYEKSI PER 31 DESEMBER TAHUN 20XX+1 (Rp)
1	2	3
<i>Piutang kepada</i>		
<i>Piutang kepada</i>		
<i>Piutang kepada</i>		
<i>JUMLAH</i>		

2. Penjelasan Atas Informasi Lainnya

.....

BAB V
PENUTUP

A. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN DALAM IMPLEMENTASI KEGIATAN BLUD

(Memuat antara lain tentang: penghapusan piutang, penghapusan persediaan, penghapusan aset tetap, penghapusan aset lain-lain, pemberian pinjaman, kerjasama dengan pihak ketiga, remunerasi pejabat pengelola dan pegawai serta dewan pengawas).

B. KESIMPULAN

(Berisikan seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran yang dipandang perlu).

Sumedang, 20XX
BLUD UPT
Pemimpin,

.....
NIP.

LAMPIRAN

(Memuat hal-hal yang perlu dilampirkan sebagai data pendukung dalam penyusunan RBA).

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 81 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA BISNIS
DAN ANGGARAN SERTA DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
SEBAGAI UNIT KERJA YANG MENERAPKAN STATUS POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PENUH

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN

A. Format Surat Pengajuan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS KESEHATAN

Jln. Kutamaya No. 21 Sumedang Telp. 0261 – 202377 Fax 0261 204941

Nomor : / /Diskes Sumedang,
Lampiran : - Kepada,
Perihal : Permohonan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang di

SUMEDANG

1. Dasar Hukum:
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Pusat kesehatan Masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
 - c. Peraturan Daerah Nomor tentang Penjabaran APBD Tahun
2. Alasan/pertimbangan perlunya revisi Rencana Bisnis dan Anggaran:
 - a.
 - b.
3. Bersama ini diusulkan perubahan Anggaran dengan rincian sebagai berikut:
 - a. mengubah pendapatan;
 - b. mengubah komponen biaya tanpa mengubah komponen belanja;
 - c. mengubah komponen biaya tanpa mengubah komponen belanja;
 - d. pergeseran komponen biaya tanpa mengubah komponen belanja;
 - e. pergeseran komponen biaya dengan mengubah komponen belanja; *)
4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa:
 - a. format perubahan pendapatan dan biaya;
 - b. format perubahan pendapatan dan belanja;
 - c. SPTJM

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan bantuannya.

Pemimpin BLUD UPT

.....,

.....
NIP

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bappppeda Kabupaten Sumedang;
2. Yt. Kepala BPKAD Kabupaten Sumedang.

*) pilih klasifikasi yang sesuai dengan maksud perubahan RBA

B. Format Perubahan Pendapatan dan Biaya

Komponen Biaya	Anggaran				
	Semula	Menjadi			
		Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
I. Pendapatan					
A. Jasa Pelayanan					
B. Hibah					
C. Kerjasama					
D. APBD					
E. APBN					
F. Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah					
G. Jasa Pelayanan					
Jumlah Pendapatan (I)					
II. Biaya					
A. Biaya Pelayanan					
1. Biaya Pegawai					
.....					
2. Biaya Bahan					
.....					
3. Biaya Jasa Pelayanan					
.....					
4. Biaya Pemeliharaan					
.....					
5. Biaya Barang dan Jasa					
.....					
6. Biaya Depresiasi					
.....					
7. Biaya Pelayanan Lainnya					
.....					
B. Biaya Umum dan administrasi					
1. Biaya Pegawai					
.....					
2. Biaya Administrasi Kantor					
.....					
3. Biaya Pemeliharaan					
.....					
4. Biaya Barang dan Jasa					
.....					
5. Biaya Promosi					
.....					
6. Biaya depresiasi					
.....					
7. Biaya Umum dan Administrasi lainnya					
.....					

1	2	3	4	5	6
C. Biaya Non Operasional					
1. Biaya Bunga					
.....					
2. Biaya Administrasi Bank					
.....					
3. Biaya Kerugian penjualan aset tetap					
.....					
4. Biaya Kerugian penurunan nilai Kurs					
.....					
5. Biaya Non Operasional lainnya					
.....					
Jumlah Biaya (II)					
D. Pengeluaran Investasi					
1. Tanah					
2. Peralatan dan mesin					
3. Gedung dan bangunan					
4. Kendaraan					
5. Perlengkapan dan peralatan kantor					
6. Jalan, irigasi, dan jaringan					

C. Format Perubahan Pendapatan Belanja

Komponen Belanja	Anggaran				
	Semula	Menjadi			
		Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
A. Belanja Pegawai					
1. Belanja Pegawai BLUD					
B. Belanja Barang dan Jasa					
1. Belanja Barang dan Jasa BLUD					
C. Belanja Modal					
1. Belanja Modal BLUD					

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

